

PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KULINER LAKSA DI MASA PANDEMI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Muhammad Raihan Rachman

NPP. 29.1690

Asdaf Kota Tangerang, Provinsi Banten

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: rehan.rachman@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the decrease in sales turnover of laksa business actors during the COVID-19 pandemic compared to before the pandemic. Therefore, The Department of Industry and Trade of Tangerang city has a role to empower the laksa culinary entrepreneur. **Purpose:** This study aims to find out how the Tangerang City Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs (Disperindagkop) empowers laksa culinary entrepreneurs during the pandemic. **Method:** The research method used by the author is a qualitative method with a descriptive approach based on Suharto's theory (2014), This study used some of the techniques of data collection, including interviews, observations, and documentation. The author performs data processing by presenting data, analyzing data, and drawing conclusions. The empowerment of the laksa culinary entrepreneurs has not been implemented optimally and there were still obstacles in the empowerment process. **Result:** the empowerment of the laksa culinary entrepreneurs has not been implemented optimally and there were still obstacles in the empowerment process. **Conclusion:** The results showed that the empowerment of the laksa culinary entrepreneurs by The Disperindagkop has not been implemented optimally, especially in enabling, empowering, and supporting dimensions. Several obstacles exist in the field such as lack of innovation and level of understanding, lack of dissemination of information, socialization, and training as well as the development of empowerment locations and partnership networks.

Keywords: Empowerment, Laksa Culinary Entrepreneurs, MSMEs

1956 ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti memfokuskan penelitian pada penurunan omset penjualan para pelaku usaha laksa di masa Pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelum pandemi. Oleh karena itu Disperindagkop Kota Tangerang mempunyai peran untuk melakukan pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang (Disperindagkop) dalam melakukan pemberdayaan pengusaha kuliner laksa di masa pandemi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teori Suharto (2014), dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis dalam melakukan pengolahan data dengan

melakukan penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pengusaha kuliner laksa belum optimal dan masih terdapat hambatan dalam proses pemberdayaannya. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan pengusaha kuliner laksa oleh Disperindagkop Kota Tangerang belum terlaksana secara optimal terutama pada dimensi pemungkinan (*enabling*), dimensi penguatan (*empowering*) dan dimensi penyokongan (*supporting*). Terdapat beberapa hambatan yang ada di lapangan seperti kurangnya inovasi dan tingkat pemahaman pengusaha laksa, kurangnya penyebarluasan informasi sosialisasi dan pelatihan oleh Disperindag serta kurangnya pengembangan lokasi pemberdayaan dan jejaring kemitraan bagi pengusaha kuliner laksa.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pengusaha Kuliner Laksa, UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo setahun yang lalu (hukumonline.com, 2020). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai wabah pandemi yang bersifat global oleh Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO). Dampak pandemi ini berdampak kepada proses pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan *refocusing* anggaran sebagai upaya penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) serta pemulihan perekonomian nasional dan pengamanan daya beli masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -2,07% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 5,02% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021). Angka kemiskinan pun bertambah seiring dengan kegiatan perekonomian yang tidak berjalan dengan normal akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran karena perusahaan mengurangi jumlah karyawan akibat beban biaya produksi yang besar dibandingkan dengan pendapatan.

Pandemi ini berdampak pada pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sekitar 90% pemilik usaha kecil terkena dampak pandemi COVID-19. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sektor ini merupakan salah satu penyumbang utama perekonomian Indonesia, antara lain:

1. Penyerapan tenaga kerja sebesar 89,2%
2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia hingga 99%
3. Menyumbang Pendapatan Bruto Domestik (PDB) Nasional sebesar 60,34%
4. Sektor ekspor, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 14,17% dari total ekspor
5. Sektor investasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyumbang 58,18% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2016)

Pemerintah berkewajiban melakukan pengentasan permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih di masa Pandemi COVID-19 agar eksistensi usaha kecil tetap terjaga dan pulih seperti semula. Salah satunya adalah pemberdayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19. Pemberdayaan adalah upaya untuk memungkinkan orang membangun diri mereka sendiri dan dengan demikian meningkatkan kehidupan mereka Slamet, 2003). Pemberdayaan bertujuan untuk penguatan perekonomian nasional serta menuntut masyarakat

agar tidak bergantung dengan pemerintah dan lembaga swasta lainnya, sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Tangerang berkewajiban memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya dalam hal memajukan taraf hidup masyarakat. Dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan dengan melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang. Di masa pandemi saat ini, peran usaha kecil dalam pembangunan ekonomi Kota Tangerang sangat penting. Usaha kecil dapat tumbuh dengan cepat dan menciptakan lapangan kerja baru bagi yang terkena dampak COVID-19. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil pasal (6) ayat a yaitu melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah tersebut, melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tangerang diharapkan masyarakat dapat menciptakan peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Berikut tabel jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten tahun 2018:

Tabel 1
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Berdasarkan Kota/Kabupaten Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1.	Kabupaten Lebak	49.498	825	15	50.338
2.	Kabupaten Tangerang	41.155	0	0	41.155
3.	Kabupaten Serang	22.667	3.958	284	26.909
4.	Kota Tangerang	11.079	633	34	11.746
5.	Kota Cilegon	6.446	100	0	6.546
6.	Kota Serang	6.495	3.595	222	10.321
7.	Kota Tangerang Selatan	7.094	2.488	0	9.582
8.	Kabupaten Pandeglang	900	100	2	1.002

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2018

Berdasarkan data di atas Kota Tangerang menempati urutan keempat yang memiliki jumlah usaha kecil terbanyak di Provinsi Banten. Kota Tangerang sebagai daerah penyangga ibukota dan sebagai kota terbesar di Provinsi Banten, sekaligus ketiga di wilayah Jabodetabek setelah Jakarta dan Bogor. Dengan luas wilayah sebesar 164,55 km² serta jarak antara Kota Tangerang dan ibukota Provinsi Banten sekitar 65 km memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.139.891 jiwa (Badan Pusat Statistika Kota Tangerang, 2021). Hal ini menjadi persoalan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar taraf kehidupan dapat meningkat melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Upaya Pemkot Tangerang dalam prioritas program pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan dan meningkatkan pelaku usaha kecil di Kota Tangerang. Program Tangerang BISA dan Tangerang EMAS merupakan salah satu program pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Program Tangerang Bantuan Insentif Untuk Star-UP Anda (Tangerang BISA) merupakan program bantuan permodalan usaha sebesar Rp 500.000,00 dari Pemerintah Kota Tangerang kepada pelaku UMKM pemula yang akan memulai usaha atau mengembangkannya di masa pandemi. Sedangkan program Tangerang Ekonomi Masyarakat Sejahtera (Tangerang EMAS)

merupakan program untuk membantu masyarakat berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan target Usaha Kecil Menengah pemula. Diharapkan kedua program tersebut dapat menjadi solusi dalam permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masa pandemi ini.

Salah satu produk usaha kecil kuliner khas Kota Tangerang ialah Laksa. Laksa sebagai makanan khas Kota Tangerang memiliki keunikan dari segi cita rasanya, kekentalan bumbunya berbeda dengan laksa dari daerah lain seperti Laksa Bogor dan Laksa Betawi. Banyak dari pengusaha Kuliner Laksa di Kota Tangerang yang mengalami kerugian di masa pandemi saat ini, sehingga dibutuhkan pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa dan mempromosikan Kuliner Khas Kota Tangerang kepada masyarakat di luar Kota Tangerang. Dengan kearifan lokal nya diharapkan Laksa Tangerang dapat tetap eksis di masa pandemi saat ini

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Para pengusaha kuliner laksa di Kota Tangerang biasanya merupakan orang Tangerang yang sudah ada sejak dahulu dan diturun temurunkan kepada anak dan cucunya. Pengusaha laksa di Kota Tangerang biasa menjajakan dagangannya dengan menetap pada Kawasan Kuliner Laksa sebagai sentral penjualan laksa khas Tangerang dan atau juga berkeliling. Di Kota Tangerang Setidaknya beberapa tempat yang menjadi lokasi pemberdayaan pengusaha laksa yaitu Kawasan Kuliner Laksa, Sekitar Pasar Anyar, Pasar Lama Tangerang, Sekitar LP Wanita Tangerang dan sekitar Kawasan Modernland Tangerang. Berikut tabel daftar nama pengusaha yang ada di Kawasan Kuliner Laksa:

Tabel 2
Daftar Nama Pengusaha Laksa di Kota Tangerang
Dan Jumlah Pegawai

No	Nama Kios	Jumlah Pegawai
1.	Kios Bang Lepay	3
2.	Kios Bang Kumis	2
3.	Kios Bang Brewok	3
4.	Kios Bang Kumis Bewok	2
5.	Kios Bang Tubing	2
6.	Kios Bang UU	2
7.	Kios Bang Awing	2

Sumber: Siahaan, 2021

Menurut data di atas tercatat ada 7 Pengusaha Kuliner Laksa di Kota Tangerang. Dimana ketika awal dibangun kawasan kuliner laksa terdapat 8 Pengusaha Kuliner Laksa banyak para pengusaha laksa keliling di luar kawasan kuliner laksa yang belum terdata pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Menurut pengakuan salah satu penjual laksa yaitu Kios Bang Lepay mengatakan, pendapatan penjualan laksa di masa pandemi terjadi penurunan drastis sebesar 70% (Lensametro.com, 2021). Pemerintah Kota Tangerang sendiri mempunyai program Tangerang BISA dan Tangerang EMAS yang dapat mengatasi permasalahan permodalan para pelaku usaha kecil

di Kota Tangerang pada masa pandemi ini. Namun, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pengusaha laksa serta kurangnya lokasi pemberdayaan membuat pengusaha laksa belum memiliki kestabilan dalam menjalankan usahanya yang berakibat pada penurunan omset penjualan selama masa Pandemi COVID-19.

Tabel 3
Pendapatan para pengusaha laksa sebelum dan selama masa pandemic COVID-19 Di Kawasan Kuliner Laksa

No	Pengusaha Laksa	Penjualan Laksa perhari (porsi)	
		Sebelum Pandemi	Selama Masa Pandemi
1.	Bang UU	300	150
2.	Bang Lepad	290	145
3.	Bang Tubing	260	130
4.	Bang Kumis	300	150
5.	Bang Brewok	350	175
6.	Bang Kumis Brewok	250	125
7.	Bang Awing	280	140

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2022

Dapat dilihat pada data di atas bahwa penurunan omset penjualan para pengusaha laksa di Kawasan Kuliner Laksa selama Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dua kali lipat dibandingkan dengan sebelum masa Pandemi. Banyak dari pengusaha Kuliner Laksa di Kota Tangerang yang mengalami kerugian di masa pandemi saat ini, sehingga dibutuhkan pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa dan mempromosikan Kuliner Khas Kota Tangerang kepada masyarakat di luar Kota Tangerang. Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) perlu menerima perhatian lebih pemerintah terlebih di masa pandemi saat ini. Sebab diperlukan sektor Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang bisa menunjang serta meningkatkan kecepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu diperlukannya pemberdayaan untuk membuat pengusaha laksa di Kota Tangerang dapat menghasilkan produk yang mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan perekonomian para pengusaha laksa serta tidak bergantung pada bantuan permodalan yang telah di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Tangerang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada empat penelitian yang dijadikan pedoman oleh penulis dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febrianti yang berjudul “Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung”. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Potret Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tulungagung rata-rata berdiri sendiri dan merintis dari nol sehingga menjadi berkembang, 2. Strategi yang dilakukan pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melakukan Bimbingan Teknis melalui Pemasaran Online dan offline, serta mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kopersi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM), 3. Hambatan internal pelaku usaha kecil yaitu kurangnya partisipasi pelaksanaan pelatihan, kurang rasa percaya diri, dan motivasi dari orang terdekat. Langkah dalam menghadapi hambatan ialah mengadakan pelatihan secara berulang, workshop dan bimbingan teknis.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa yang berjudul “ Kondisi Sosial Ekonomi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur”. Penelitian ini berisi tentang penurunan pendapatan pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetapi mereka masih bisa bertahan dan tetap tercukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan alasan Alasannya yaitu kondisi tempat tinggal sudah memadai (Permanen) dana Anggota keluarga Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) begitu juga para karyawan yang telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nanang Yusroni dkk yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kuliner di masa pandemi COVID-19 melalui media sosial pada UKM Al-Quddus Catering Karang Rejo Rt 03/ Rw 03 Banyumanik Semarang Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kuliner Al-Quddus melalui media Sosial dapat diterapkan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat membawa manfaat dan juga dapat direalisasikan nantinya.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan”. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, melakukan promosi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta melakukan pengecekan pada proses dan Teknik produksi dalam peningkatan kualitas produk.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan Febrianti, Khairunisa, Nanang Yusroni maupun Amiruddin. Disamping perbedaan lokus penelitian, juga memiliki perbedaan dalam metode, teori yang digunakan dalam penelitian penulis dan pada program permodalan khususnya pada Program Pemerintah Kota Tangerang yaitu Tangerang EMAS dan Tangerang BISA.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa di masa pandemi yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Tangerang, faktor apa yang menghambat dalam Pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa di masa pandemi yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Tangerang dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengatasi hambatan Pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa di masa pandemi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan teori pemberdayaan Suharto (2014) melalui lima dimensi yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*) dan pemeliharaan (*fostering*). Penulis dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis terhadap 11 informan yaitu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan, Kepala Seksi Data dan Kualitas SDM Usaha Mikro, dan tujuh

pengusaha kuliner laksa baik di Kawasan Kuliner Laksa maupun pengusaha kuliner laksa keliling. Setelah mendapatkan data kemudian penulis menggunakan teknik analisis yaitu penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Tabel 4
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi	Indikator
Pemberdayaan Masyarakat	Pemungkinan (<i>Enabling</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Usaha • Akses Modal • Lokas • Pemberdayaan Fasilitas Umum
	Penguatan (<i>Empowering</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pengetahuan • Peningkatan sikap dan keterampilan
	Perlindungan (<i>Protecting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang • Peraturan Pemerintah
	Penyokongan (<i>Supporting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Pelatihan dan Pendampingan • Penguatan Kelembagaan • Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) • Pengembangan Jejaring dan Kemitraan
	Pemeliharaan (<i>Fostering</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kestabilan Usaha • Kaderisasi Bidang Usaha Inovasi Baru

Sumber: Suharto, 2014

Edi Suharto berpendapat bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan sebagaimana pengertian pemberdayaan masyarakat di atas, akan tercapai melalui implementasi pendekatan pemberdayaan yang ada pada dimensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemungkinan (*enabling*) adalah membuat suasana lingkungan masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Keterkaitan dimensi pemungkinan dengan pemberdayaan kepada pengusaha kuliner laksa ialah pada bidang usaha, akses modal, lokasi pemberdayaan, dan fasilitas umum.
2. Penguatan (*empowering*) adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk memenuhi segala

kebutuhan kehidupannya. Pada dimensi penguatan, indikator yang diambil oleh penulis ialah pemberian pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan para pelaku usaha kuliner laksa.

3. Perlindungan (*protecting*) adalah masyarakat terlindungi dari kelompok kuat dan yang mendominasi terutama untuk masyarakat kelompok lemah sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sebanding, tidak adanya kelompok yang tereksplotasi dari kelompok kuat kepada kelompok lemah. Indikator dalam dimensi perlindungan ditinjau dari aspek Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
4. Penyokongan (*supporting*) adalah bimbingan dan dukungan diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan peran dan tugas dalam kehidupannya dengan penuh tanggung jawab. Pada dimensi ini penulis mengambil indikator pemberian pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan, pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan jejaring dan kemitraan.
5. Pemeliharaan (*fostering*) adalah memelihara kondusifitas untuk mencapai keseimbangan kekuasaan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini setiap orang mendapatkan kesempatan dalam berusaha sehingga pemberdayaan dapat menciptakan suatu keseimbangan dan keselarasan (Suharto, 2014). Pada dimensi ini diambil indikator yang berhubungan dengan kestabilan usaha, kaderisasi bidang usaha dan inovasi baru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laksa merupakan kuliner makanan khas Kota Tangerang yang terbuat dari mie tepung beras putih yang diberi campuran kuah kuning kental yang terbuat dari rempah-rempah lalu ditaburi daun kucai di atasnya serta adanya parutan kelapa dan kacang hijau sehingga memiliki cita rasa manis pada kuahnya yang khas (Indonesia.go.id, 2019). Biasanya laksa disantap dengan paduan ayam kampung bakar, telur rebus dan tahu serta dengan kerupuk dan disantap saat hangat. Para pengusaha laksa di Kota Tangerang biasanya merupakan orang Tangerang yang sudah ada sejak dahulu dan diturun temurunkan kepada anak dan cucunya. Pengusaha laksa di Kota Tangerang biasa menjajakan dagangannya dengan menetap pada suatu Kawasan Kuliner Laksa dan atau juga berkeliling. Dimana rata-rata para pengusaha laksa keliling memiliki dua sampai tiga gerobak dagangan laksa yang digunakan untuk berjualan keliling.

Gambar 1
Kuliner Laksa Khas Kota Tangerang



Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

Para pengusaha laksa di Kota Tangerang umumnya merupakan hasil turun temurun dan hubungan kekerabatan yang dilanjutkan oleh para pengusaha laksa yang masih aktif berjualan di Kota Tangerang. Berikut beberapa pengusaha laksa di Kota Tangerang:

1. Laksa Bang UU
2. Laksa Bang Lepad
3. Laksa Bang Tubing
4. Laksa Bang Kumis
5. Laksa Bang Brewok
6. Laksa Bang Kumis Brewok
7. Laksa Bang Awing
8. Laksa Keliling Bang Abdul
9. Laksa Keliling Bang Iqbal
10. Laksa Keliling Bang Aldi
11. Laksa Keliling Bang Alwi (Data diolah oleh penulis, 2022).

3.1. Pemberdayaan Pengusaha Kuliner Laksa Di Masa Pandemi Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam melakukan pemberdayaan terhadap pengusaha kuliner laksa yang berkaitan dengan fokus penelitian dan sesuai dengan latar belakang penulis maka kajian teoritis yang akan digunakan adalah Teori pemberdayaan Edi Suharto (2014) melalui pendekatan dalam lima dimensi yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), pemeliharaan (*fostering*) yang merupakan pencapaian tujuan dari pemberdayaan (Suharto, 2014).

a. Pemungkinan (*enabling*),

a. Bidang Usaha

Pada indikator ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dari pihak pemerintah sudah melakukan inovasi dalam menyediakan tempat untuk berjualan, dan dari pihak pengusaha laksa juga sangat bersyukur karena akhirnya mereka mendapatkan tempat yang tetap untuk berjualan laksa. Selain itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum ada pendampingan dalam memasarkan laksa dan para pengusaha laksa dalam memasarkan laksa masih inisiatif untuk mendaftarkan secara *online* melalui *Grab Food* dan *Go-Food*. Penulis menyimpulkan bahwa penjaminan pemasaran bagi para pengusaha laksa masih belum optimal terlebih dimasa Pandemi COVID-19.

Pemerintah Kota Tangerang mempunyai program untuk para pelaku usaha kecil di Kota Tangerang yaitu Tangerang EMAS dan Tangerang BISA. proses pelaksanaan Program Tangerang BISA dan Tangerang EMAS ini sudah berjalan dan para pelaku usaha laksa merasa terbantu tetapi belum optimal dalam hal penyaluran kepada para pengusaha laksa sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Penerima Program Tangerang EMAS per November

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Plafon
		Kelompok	Debitur	
1.	Ciledug	1	6	Rp. 11.000.000
2.	Benda	1	9	Rp. 17.000.000
3.	Tangerang	4	29	Rp. 55.000.000
4.	Pinang	18	164	Rp. 328.000.000
5.	Periuk	2	16	Rp. 32.000.000
6.	Cipondoh	2	14	Rp. 28.000.000
7.	Karawaci	2	13	Rp. 26.000.000
8.	Batuceper	3	29	Rp. 58.000.000
JUMLAH		27	280	Rp. 555.000.000

Sumber: Disperindagkop Kota Tangerang, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 27 kelompok dengan jumlah debitur sebanyak 280 orang sebagai penerima bantuan peminjaman modal usaha untuk mengembangkan usahanya di masa pandemi saat ini. Total dana yang telah dikeluarkan dalam program ini sebesar Rp. 555.000.000 dengan Kecamatan Pinang sebagai kecamatan yang memiliki jumlah debitur yang paling banyak sejumlah 164 orang. Program ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi pembiayaan bagi pelaku usaha di Kota Tangerang dan diharapkan dapat meringankan beban para pelaku usaha di masa pandemi saat ini.

b. Akses Modal

Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2020 bahwa anggaran pada program pemberdayaan usaha mikro mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.910.810.349 . Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat drastis, dimana Dinas Perindagkop mendapat realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 181.670.000 dari rencana sebelum perubahan sebesar Rp 3.679.315.500 . Hal ini disebabkan karena perubahan rencana kegiatan yang semula akan digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kemudian melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19.

c. Lokasi Pemberdayaan

Lokasi pemberdayaan dari pengusaha laksa adalah pada kawasan kuliner laksa yang beralamat di Jl Mochammad Yamin No 113 Kota Tangerang Provinsi Banten. Selain itu, pedagang laksa diluar kawasan kuliner laksa biasa menjajakan dagangannya di depan LP Wanita Tangerang, di sekitaran pasar anyar dan pasar lama serta sekitaran

modernland Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan didapatkan bahwa para pengusaha laksa keliling berkeinginan untuk berjualan di tempat yang tetap dan siap untuk direlokasi seperti di Kawasan Kuliner Laksa. Tetapi keterbatasan lahan untuk membuat Kawasan tersebut menjadi hambatan untuk membangun Kawasan Kuliner Laksa yang lain.

Gambar 2
Kawasan Kuliner Laksa



Sumber: Dokumentasi penulis, 2022

d. Fasilitas Umum

Fasilitas umum untuk menunjang pemberdayaan kepada pengusaha laksa telah tersedia dan pengusaha laksa merasa terbantu atas fasilitas yang telah disediakan berupa Taman Tematik di Sekitar LP Wanita Tangerang dan Taman Kuliner Laksa oleh pemerintah untuk berjualan dan peran pengusaha laksa dalam menjaga kebersihan tempat usaha telah dilakukan. Diharapkan pemerintah kedepannya dapat membuat lebih banyak fasilitas umum untuk tempat berjualan laksa.

Adanya pemberdayaan pengusaha kuliner laksa pada dimensi pemungkinan (*enabling*) belum tercipta suatu suasana yang memungkinkan para pelaku usaha laksa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Karena masih belum optimal dalam bidang usaha, akses modal, ketersediaan lokasi pemberdayaan dan fasilitas umum dalam Pemberdayaan Pengusaha Laksa.

b. Penguatan (*empowering*)

a. Pemberian Pengetahuan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pemberdayaan kepada pengusaha laksa dengan melakukan pemberian pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia pelaku usaha laksa tersebut. pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* tetapi dari pihak pengusaha laksa menyatakan belum mau untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan alasan malu untuk datang ke dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM melakukan pemberian pengetahuan berupa *Capacity Building* kepada para pengusaha laksa yang belum memiliki *mindset* yang baik terhadap pengembangan usahanya. Sejauh ini terdapat hambatan dalam proses pemberian pengetahuan yaitu tidak semua pengusaha laksa mau untuk di edukasi dan kurangnya inovasi dari pengusaha laksa sehingga minat pembeli menurun dibandingkan sebelum masa pandemi.

b. Peningkatan Sikap dan Keterampilan

Peningkatan Sikap dan Keterampilan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk menumbuhkan sikap disiplin dan jujur bagi pengusaha laksa. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah memberikan sosialisasi serta bentuk pelatihan seperti food stylish, uji Laboratorium, dan sertifikasi halal untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha laksa. Akan tetapi, sosialisasi tersebut masih belum optimal sehingga harus di lakukan secara merata kepada semua pengusaha laksa di Kota Tangerang.

Pada Dimensi Penguatan (*empowering*) masih belum optimal diberikan dalam pemberdayaan pengusaha kuliner laksa. Masih terdapat hambatan dalam memberikan pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan kepada pengusaha laksa.

c. Perlindungan (*protecting*),

Perlindungan mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat atau kelompok lemah sehingga tidak terjadi penindasan dari kelompok yang kuat, tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang, dan tidak ada eksploitasi kepada kelompok lemah. Dengan adanya hukum yang terikat sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan bagi para pelaku usaha khususnya pengusaha laksa. menyeluruh. Dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai landasan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankannya. Perlindungan dibutuhkan dalam suatu lembaga dalam melaksanakan program kegiatan yang di rencanakan. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai landasan hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d) Peraturan Menteri Koperasi No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro
- e) Peraturan Walikota Tangerang No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Dimana pada Dimensi Perlindungan (*Protecting*) telah dilakukan oleh pemerintah sehingga pengusaha laksa dalam melaksanakan kegiatan usaha telah mendapatkan jaminan hukum.

d. Penyokongan (*supporting*),

a. Pemberian Pelatihan dan Pendampingan

Dinas telah memberikan pelatihan dan pendampingan seperti pelatihan pengelolaan administrasi keuangan setiap sekali seminggu sejumlah 12 sesi, tetapi tidak difokuskan untuk pengusaha kuliner laksa. Pengusaha laksa mengungkapkan bahwa pelatihan yang didapat hanya sebatas sertifikasi halal, Uji BPOM dan PIRT sedangkan pelatihan pengelolaan administrasi keuangan belum dilakukan. Kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan dari sisi administrasi keuangan yang menjadi masalah utama para pelaku usaha mikro khususnya pengusaha laksa. Pada Dimensi Penyokongan (*Supporting*) dalam pemberdayaan pengusaha laksa masih belum optimal pada indikator pemberian pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring kemitraan.

b. Penguatan Kelembagaan

Penguatan yang diberikan kepada pengusaha laksa berupa sarana prasarana untuk berjualan, bantuan permodalan usaha dan pengembangan usaha. Walaupun demikian, para pengusaha laksa kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya inovasi dari pengusaha laksa itu sendiri sehingga kuliner laksa terkesan monoton dan tidak bisa di modifikasi. Kurangnya partisipasi dari pengusaha laksa dalam melaksanakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, pengusaha laksa mengatakan bahwa selama ini belum mendapatkan pelatihan pengelolaan administrasi laporan keuangan dan pemerintah telah melakukan penambahan kerjasama dengan universitas untuk melakukan pelatihan pengelolaan administrasi laporan keuangan tetapi kurangnya partisipasi dari pengusaha kuliner laksa menyebabkan terhambatnya pemberdayaan pengusaha laksa.

c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang menerapkan konsep Smart Economy melalui aplikasi Tangerang LIVE. Dalam aplikasi ini, para pelaku UMKM dapat mengajukan program bantuan permodalan usaha yaitu Tangerang EMAS dan Tangerang BISA. Selain itu pemasaran online melalui E-Commerce Tokopedia yaitu AyoRangkul dimana merupakan E-Commerce milik Pemerintah Kota Tangerang yang mewadahi produk UMKM yang akan dijual.

d. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan

Jejaring kemitraan yang telah di bangun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM masih sangat kurang di tingkat luar Kota Tangerang terhadap pengusaha laksa. Jejaring yang dilakukan sebatas promosi melalui media sosial, bazaar atau pameran dan melalui gerai di 13 kecamatan. Dibutuhkannya cara pengemasan laksa agar dapat tahan lama di bawa ke daerah lain sebagai oleh-oleh makanan khas Kota Tangerang. Pemerintah dalam melakukan pengembangan jejaring dan kemitraan belum berfokus kepada pengusaha laksa melainkan hanya kepada UMKM. Dan untuk pengusaha laksa sendiri belum adanya jejaring kemitraan dalam memasarkan produk sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan jejaring dan

kemitraan belum optimal dan masih sebatas pada UMKM sehingga masih terdapat hambatan. Harapannya pengusaha laksa dapat menjual laksa ke berbagai daerah dan dapat meningkatkan penjualan mereka sehingga laksa dapat terkenal di masyarakat Indonesia.

Pada Dimensi Penyokongan (Supporting) dalam pemberdayaan pengusaha laksa masih belum optimal pada indikator pemberian pelatihan pendampingan, penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring kemitraan.

e. Pemeliharaan (*fostering*)

a. Kestabilan Usaha

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam penyebarluasan informasi program permodalan masih kurang. Pengaturan zona dalam penjualan harus lebih jelas agar tidak merugikan pengusaha laksa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas belum cukup stabil dalam menciptakan kestabilan usaha laksa. Oleh karena itu dibutuhkannya sosialisasi program permodalan usaha dan penataan tempat penjualan bagi pengusaha laksa di Kota Tangerang guna meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha laksa.

b. Kaderisasi Bidang Usaha

pengusaha laksa telah menyiapkan kader untuk meneruskan usaha mereka agar tetap lestari. Dinas juga tidak memperlakukan untuk kaderisasi usaha laksa yang memang dilakukan secara turun temurun dan telah menyiapkan Kawasan Kuliner Laksa sebagai tempat penjualan laksa.

c. Inovasi Baru

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang telah menyiapkan inovasi pada Tahun 2022 yaitu UMKM Awards agar para UMKM di Kota Tangerang dapat bersaing dan mencari produk UMKM unggulan Kota Tangerang.

Dapat disimpulkan bahwa telah terlaksananya pemberdayaan pengusaha laksa pada Dimensi Pemeliharaan (*Fostering*) pada indikator kaderisasi usaha dan inovasi baru tetapi terdapat hambatan dalam hal kestabilan usaha.

3.2. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Pengusaha Laksa Di Masa Pandemi Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Di Kota Tangerang

Faktor penghambat dalam pemberdayaan pengusaha laksa di masa pandemi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan yang sesuai dengan teori Suharto (2014) diantaranya:

1. Kurangnya inovasi dan tingkat pemahaman pengusaha laksa

Kurangnya inovasi dari pengusaha laksa sehingga laksa terkesan monoton di kalangan masyarakat Kota Tangerang yang Heterogen. Selain itu, mayoritas pengusaha kuliner laksa tidak tertarik dalam mengikuti pelatihan Capacity Building yang dilaksanakan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang hanya mau menerima bantuan permodalan.

2. Kurangnya penyebarluasan informasi mengenai sosialisasi dan pelatihan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Masih sebatas untuk UMKM dan tidak di khusus kan kepada pengusaha laksa. Banyak para pengusaha laksa yang masih belum mendapatkan sosialisai program permodalan seperti Program Tangerang EMAS dan Tangerang BISA serta pelatihan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Pengembangan lokasi pemberdayaan dan jejaring kemitraan

Lokasi pemberdayaan pengusaha laksa selama ini bersentral di Kawasan Kuliner Laksa dan berjualan dengan cara keliling. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan untuk membuat lokasi Kawasan Kuliner Laksa lain untuk mewedahi para pengusaha laksa keliling agar tidak berjualan pada zona yang dilarang oleh pemerintah. Selain itu hasil penjualan laksa mengalami permasalahan dalam hal packaging dimana para konsumen dari luar kota tidak dapat membawa pulang sebagai oleh-oleh khas Kota Tangerang karena tidak dapat bertahan lama.

3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dalam pemberdayaan pengusaha kuliner laksa

Sehubungan dengan berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan pengusaha laksa, tentu berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya yang antara lain:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang terus mengencangkan pemberian pemahaman *Capacity Building* kepada pengusaha laksa dengan dilaksanakan beberapa angkatan.
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang akan menambah Kerjasama dengan Universitas yang ada di Kota Tangerang sehingga sosialisasi dan pelatihan dapat merata kepada pengusaha laksa.
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang melakukan penataan kepada para pengusaha laksa keliling terkait zona berjualan serta akan melakukan pembelian mesin guna keperluan packaging laksa agar bisa di bawa ke luar kota.

3.4. Diskusi Temuan Utama

Penulis menemukan temuan utama dalam penelitian mengenai pemberdayaan pengusaha laksa di masa pandemi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang berdasarkan teori pemberdayaan Suharto (2014) dengan menggunakan lima dimensi yang jika ketika dimensi tersebut berjalan secara optimal maka akan menciptakan peningkatan dan pengembangan usaha kuliner laksa lebih maju lagi. Akan tetapi dilapangan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas tidak dilaksanakan secara optimal. Penulis menemukan bahwa tingkat partisipasi pengusaha laksa untuk mengikuti pelatihan *Capacity Building* masih kurang dan hanya mau menerima bantuan permodalan saja. Program bantuan telah diberikan oleh Pemerintah tetapi dari pihak pengusaha malu untuk mengajukannya sehingga belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengembangan usaha laksa yang terkesan monoton sehingga kurangnya inovasi yang dilakukan oleh pengusaha laksa. Penyebarluasan informasi sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas masih kurang dan sebatas untuk UMKM saja.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan pengusaha kuliner laksa di masa pandemi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum terlaksana secara optimal dan terdapat beberapa hambatan pada dimensi pemungkinan (enabling) yaitu pada indikator bidang usaha, akses modal, lokasi pemberdayaan dan fasilitas umum, dimensi penguatan (empowering) yaitu pada indikator pemberian pengetahuan dan peningkatan sikap dan keterampilan serta dimensi penyokongan (supporting) yaitu pada indikator pemberian pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring dan kemitraan berdasarkan teori Suharto (2014).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar perlu adanya penelitian lain mengenai pemberdayaan pengusaha UMKM yang dilakukan di lokasi lain sebagai bahan perbandingan dan juga untuk menambah referensi keilmuan di bidang pemberdayaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2010.
- Husain Usaman dan Purnomo S. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawan, Rully., Yaniawati, R. Poppy, 2014. Metodologi Penelitian Bandung: PT. Refika
- Jonathan, S. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lexy J Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardikanto dan Subianto. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Bandung: Alfabeta
- _____, _____. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nurdin, Ismail; Hartati, Sri. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deep Publish
- Setiawan; Albi Anggito J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan Bandung: Alfabeta
- Stake, F Robert. 2010. Qualitative Research. Newyork: Guilford Press
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- _____. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- _____. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama

Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Koperasi No 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid-19

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang Tahun 2021

C. Jurnal

Amiruddin, A. 2018. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR, Surabaya

Febrianti, S. 2020. *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten TulungAgung*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN. TulungAgung

Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 11 No. 3, Desember 2020, Hal. 179-188

Khairunisa, S. 2021. *Kondisi Sosial Ekonomi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Helvetia Timur*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU. Medan

Kuliner Menurut Para Ahli: Jurnal UAJY: 2014

Mulyawan, R. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan pembangunan*. Bandung: UNPAD Press

Myra. P. Gunawan. 2003. *Seni Kuliner dan Perangkat Saji Makanan Khas Nusantara*. Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata.

Peran dan Fungsi Makanan: Jurnal UAJY: 2014, hal 12-13

Siahaan, D. 2021. Pengaruh Covid-19 Terhadap Objek Wisata Kota Tangerang Serta Dampaknya Dalam Pengembangan Wilayah: Studi Kasus Kawasan Kuliner Laksa Tangerang. Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB. Bandung

Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Tesis. IPB. Bogor.

Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Ulum, Chazienul. 2016. Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan. Malang: UB Press

Yusroni, Nanang dkk. 2021. Pemberdayaan Usaha Kuliner di masa pandemi covid-19 melalui media social pada UKM Al-Quddus Catering Karang Rejo Rt 03/ Rw 03 Banyumanik Semarang Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Semarang

Zahrulianingdyah, Atiek. Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Teknobuga, 6.1 (2018), hlm 1–9

Zulkifli. UMKM Menuju Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemi Covid-19. Manajemen Bisnis di Era Pandemi Covid-19 dan New Normal. Edisi 1, Agustus 2020. Hal 84

D. Sumber Lainnya

Achmad Irfan Fauzi, “DPRD Dorong Pemkot Tangerang Tingkatkan PAD”
, (<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/28389/DPRD-Dorong-Pemkot-Tangerang-Tingkatkan-PAD> diakses tanggal 27 Agustus 2021)

Achmad Irfan Fauzi, “PAD Kota Tangerang Anjlok Rp 1,3 Triliun”
, (<http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/32589/PAD-Kota-Tangerang-Anjlok-Rp130-Triliun> diakses tanggal 27 Agustus 2021)

Antonius Purwanto, “Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19: Konsep, Potret, dan Strategi Pengentasan” (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kemiskinan-pada-masa-pandemi-covid-19-konsep-potret-dan-strategi-pengentasan>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021)

Berita Kota Tangerang (tangerangkota.go.id) tahun 2021

Bps Kota Tangerang, Kota Tangerang Dalam Angka tahun 2021

Bps Provinsi Banten 2018

<https://disindagkopukm.tangerangkota.go.id/profile/tentang>

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran Covid-19 ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-Covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/)

Indonesia.go.id-Mie Laksa, Kuliner Khas Tangerang Buah Kebudayaan Peranakan KBBI Edisi 2003. Definisi Kuliner

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Lensametro.com, sabtu 22 januari 2021

Pengertian Pandemi, KBBI

Satgas Penanganan Covid-19,2021